



SurveyMETER

Data Menginspirasi Kebijakan

*Episode Studi Kota Balikpapan
Menuju Kota Ramah Lanjut Usia 2030*

**Ni Wayan Suriastini, Arnaldo Pellini, Bondan Sikoki,
Jejen Fauzan, Setyo Pujiastuti, Sukamtiningsih**



Data Menginspirasi Kebijakan:

Episode Studi Kota Balikpapan Menuju Kota Ramah Lanjut Usia 2030

Ni Wayan Suriastini, Arnaldo Pellini, Bondan Sikoki, Jegen Fauzan,
Setyo Pujiastuti, Sukamtiningsih



Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada *Knowledge Sector Initiative* (KSI) atas dukungan yang diberikan terhadap Studi ini. Dukungan terhadap studi ini dalam kerangka kemitraan antara SurveyMETER dan *Knowledge Sector Initiative* yang dibiayai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT). Pendapat dan pandangan penulis yang terdapat dalam episode studi ini tidak mencerminkan pandangan DFAT maupun KSI.



Daftar Isi

Abstrak	2
Daftar Singkatan	3
Pendahuluan	4
Konteks dan Latar Belakang	4
Perubahan Kebijakan	5
Timeline	8
Peranan Riset dalam Kebijakan	11
Bagaimana Riset Dikomunikasikan	13
Kesimpulan dan Pembelajaran	13
Daftar Pustaka	14



Abstrak

Paparan studi episode diawali dengan cerita lahirnya Rencana Aksi Daerah Kota Balikpapan Menuju Kota Ramah Lanjut Usia 2015-2030 di penghujung tri-semester ketiga tahun 2014. Kilas balik rekaman perubahan kebijakan dan alasannya serta *timeline* kejadian penting berikut pelakunya dirangkai dalam paparan proses adopsi informasi hasil riset menjadi kebijakan. Jalur yang ditempuh informasi hasil riset Asesmen Kota Ramah Lanjut Usia yang dilakukan SurveyMETER dan CAS UI di tahun 2013 mempengaruhi kebijakan ikut dicermati. Faktor-faktor kunci yang berperan merubah informasi hasil riset menjadi kebijakan turut diidentifikasi dalam studi episode ini.

Faktor kunci yang menyebabkan hasil riset tersebut diperhitungkan dalam kebijakan di Kota Balikpapan paling tidak karena enam hal. Pertama, keterbukaan pimpinan daerah kota pada bukti dari hasil riset. Kedua, keterencanaan pemerintah daerah untuk mencapai goal yang ingin dicapai. Ketiga, hasil penelitian disampaikan secara sederhana dalam indeks komposit dan kategori warna pencapaian. Keempat, rekomendasi diberikan secara detail sehingga bisa diadopsi langsung dalam kebijakan. Kelima, adanya kepercayaan pengambil kebijakan pada peneliti yang lahir dari empat faktor sebelumnya. Keenam, lingkungan kebijakan yang kondusif.

Daftar Singkatan

APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
ASEAN	The Association of Southeast Asian Nations
BPS	Badan Pusat Statistik
CAS UI	Center for Aging Studies University of Indonesia
CSR	Corporate Social Responsibility
Dinakersos	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	Hak Asasi Manusia
HLUN	Hari Lanjut Usia Nasional
IDRC	The International Development Research Center
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Komda Lansia	Komisi Daerah Lanjut Usia
Komnas Lansia	Komisi Nasional Lanjut Usia
KRL	Kota Ramah Lanjut Usia
KSI	Knowledge Sector Initiative
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemkot	Pemerintah kota
Perda	Peraturan Daerah
PKK	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PP	Peraturan Pemerintah
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
RAD	Rencana Aksi Daerah
RAD-LS	Rencana Aksi Daerah Kota Balikpapan Menuju Kota Ramah Lanjut Usia
Raperda	Rancangan Peraturan Daerah
SKPD	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SurveyMETER	Survey, Measurement, Training and Research
UU	Undang-Undang
WHO	World Health Organisation

▪ **Pendahuluan**

Salah satu metode mengukur peranan riset pada kebijakan adalah studi episode. Tahapannya mulai dengan perubahan kebijakan yang ingin diteliti. Kemudian dirunut ke belakang mengurai semua kejadian dan aktor yang berperan termasuk perubahan opini dan tingkah laku. Episode studi ini menyajikan bagaimana riset menginspirasi kebijakan. Perubahan kebijakan yang dikaji adalah deklarasi Kota Balikpapan Menuju Kota Ramah Lanjut Usia berdasarkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Balikpapan menuju Kota Ramah Lanjut Usia 2030.

Di pengujung tri-semester ketiga tahun 2014 Kota Balikpapan memiliki RAD Kota Balikpapan Menuju Kota Ramah Lanjut Usia 2015-2030. Kurang dari 10 bulan kemudian, pada momen perayaan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 16 Juni 2015 kota ini mendeklarasikan ikon baru “Balikpapan Menuju Kota Ramah Lansia”.

▪ **Konteks dan Latar Belakang**

Indonesia mengalami revolusi demografi. Dalam periode kurang dari 15 tahun jumlah penduduk lanjut usia akan dua kali lipat jumlah balita. Jumlah penduduk perkotaan juga semakin meningkat. Hal ini berarti isu kelanjutusiaan di Indonesia di masa mendatang menjadi sangat penting terutama di perkotaan. Isu ini juga diperhatikan secara global sehingga pada tahun 2007 WHO mengeluarkan pedoman kota ramah lanjut usia. Pedoman ini terdiri 8 dimensi yang mencakup 95 indikator penting dalam mewujudkan kota ramah lanjut usia untuk mendukung lanjut usia bisa tetap aktif di masa tua.

Sejak diperkenalkan WHO tahun 2007 inisiatif untuk mewujudkan kota ramah lanjut usia terus bergulir di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Inisiatif lahir untuk menyikapi jumlah penduduk lanjut usia di perkotaan secara global yang semakin meningkat. Bahkan dalam tempo satu tahun setelah diperkenalkan, Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia) langsung menerjemahkan pedoman WHO ini ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk juga menyelenggarakan seminar tentang kota ramah lanjut usia dengan menghadirkan sejumlah pembicara internasional pada tahun 2008.

Adopsi inisiatif ini tumbuh bervariasi di berbagai kota di Indonesia. Tulisan ini merupakan studi episode yang mengurai kilas balik perubahan dan pengaruh dari riset Asesmen Kota Ramah Lanjut Usia yang dilakukan oleh SurveyMETER dan Center for Aging Studies University of Indonesia (CAS UI) di tahun 2013 terhadap lahirnya RAD dan deklarasi Balikpapan Menuju Kota Ramah Lanjut Usia. Episode diawali dengan adegan perubahan kebijakan yang terjadi, alasan, serta latar belakang yang melandasinya. Kemudian dirangkai dengan kejadian-kejadian penting yang mendahului serta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Pada adegan ketiga, secara spesifik disajikan bagaimana peranan dari aktor riset dan komunikasi hasilnya dalam perubahan kebijakan. Di akhir episode dikupas faktor kunci yang berperan dalam perubahan kebijakan termasuk peranan dari riset tersebut.

Riset Asesmen Kota Ramah Lanjut Usia merupakan studi independen SurveyMETER dengan suport Knowledge Sector AusAID (sekarang KSI). Riset dilakukan di 14 kota besar, kota menengah, kota kecil, serta kota kategori khusus di mana Balikpapan adalah salah satunya.

Cardern (2009) mengutarakan ada tiga jalur yang dapat ditempuh oleh informasi hasil riset

dalam mempengaruhi kebijakan. Jalur pertama, informasi hasil riset memperluas kapasitas kebijakan seperti meningkatkan pengetahuan aktor dan kapasitas dalam mengkomunikasikannya. Jalur kedua, riset memperluas horizon kebijakan. Di antaranya riset memperkenalkan konsep baru untuk menyusun program baru. Jalur ketiga, mempengaruhi rezim kebijakan. Riset menyebabkan adanya memodifikasi dalam kebijakan yang sudah ada. Episode studi ini memaparkan proses adopsi riset dalam membidani lahirnya RAD dan deklarasi Balikpapan menuju Kota Ramah Lanjut Usia melalui ketiga jalur ini.

Faktor kunci yang menyebabkan hasil riset asesmen kota ramah lanjut usia SurveyMETER dan CAS UI 2013 diperhitungkan dalam kebijakan di Kota Balikpapan paling tidak karena enam hal. Pertama, keterbukaan pimpinan daerah kota pada bukti dari hasil riset. Kedua, keterencanaan pemerintah daerah untuk mencapai goal yang ingin dicapai. Ketiga, hasil penelitian disampaikan secara sederhana dalam indeks komposit dan kategori warna pencapaian. Keempat, rekomendasi diberikan secara detail sehingga bisa diadopsi langsung dalam kebijakan. Kelima, adanya kepercayaan pengambil kebijakan pada peneliti yang lahir dari empat faktor sebelumnya. Keenam, lingkungan kebijakan yang kondusif.

■ Perubahan Kebijakan

Berbasis pada RAD, pada Bulan Juni 2015 Balikpapan mendeklarasikan diri sebagai kota menuju Kota Ramah Lanjut Usia Tahun 2030. Deklarasi ini dipublikasikan secara resmi di website Dinkersos Kota Balikpapan. Sebelumnya, Walikota Balikpapan banyak mengungkapkannya dalam berbagai kesempatan.

Sedikit unik, SurveMETER selalu memperoleh update dari pengambil kebijakan. Staf Dinkersos selalu menyampaikan perkembangan Kota Balikpapan menuju kota ramah lanjut usia. Setelah menerima update perkembangan ini, SurveyMETER membentuk tim kecil melakukan episode studi ini dengan mewawancarai sejumlah pengambil kebijakan, melihat dokumen pendukung dan analisis berita media.

Episode perubahan kebijakan dipicu oleh adanya loncatan kesadaran dari suatu keadaan kependudukan yang sifatnya sangat mendesak. Demikian halnya yang terjadi dengan kebijakan kota ramah lanjut usia. Dalam jangka waktu kurang dari 15 tahun jumlah lanjut usia di Indonesia termasuk di Kota Balikpapan akan menjadi dua kali lipat jumlah sekarang. Jika sekarang jumlah balita dua kali jumlah lanjut usia, di tahun 2030 keadaannya terbalik jumlah lanjut usia dua kali lipat dari jumlah balita.

Di sisi lain, memasuki usia 60 tahun kelima lapisan tubuh manusia: fisik, energi, mental, emosional, spritual termasuk kognitif secara alami mengalami penurunan fungsi. Untuk itu diperlukan kebijakan, pelayanan, kondisi, struktur pendukung lingkungan fisik, alam dan sosial untuk mendorong orang menua secara aktif. Menua secara aktif artinya suatu keadaan yang mengedepankan proses mengoptimalkan peluang kesehatan, partisipasi dan keamanannya untuk mempertahankan kualitas hidup masa tua. Karenanya adanya lingkungan yang ramah lanjut usia akan mendukung lansia tetap aktif di masa tuanya.

RAD Kota Balikpapan menyebutkan desakan akan perlunya perubahan kebijakan ini tidak hanya merupakan tuntutan dari masyarakat global tetapi juga merupakan amanat pemerintah dan masyarakat Indonesia. Desakan global bermula dari deklarasi

kelanjutusiaan pada Global Conference of Ageing di Madrid tahun 2002. Deklarasi Madrid membuahkkan tiga pilar rekomendasi yaitu partisipasi penduduk lanjut usia dalam pembangunan negara, peningkatan layanan kesehatan dan sosial, dan lingkungan yang mendukung lansia mengalami penuaan aktif.

Keluarnya pedoman WHO tahun 2007 tentang kota ramah lansia global semakin menegaskan perlunya mewujudkan kota ramah lanjut usia di Indonesia, termasuk di Balikpapan. Pedoman WHO ini merupakan hasil studi di 33 kota dunia dengan mewawancarai para lanjut usia, pendampingnya dan pemangku kepentingan kelanjutusiaan.

Pada tingkat nasional, kebutuhan akan perlunya kebijakan kota ramah lanjut usia jauh hari telah diamanatkan UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lebih dari 50 tahun kemudian baru ada sejumlah undang-undang (UU) yang mengatur masalah kelanjutusiaan. Undang-undang terkait kelanjutusiaan ini paling tidak ada tujuh buah. Pionirnya adalah UU Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Hal-hal yang diatur dalam UU ini, sembilan tahun kemudian sebagian besar dicakup juga dalam pedoman kota ramah lanjut usia global yang dikeluarkan WHO tahun 2007. Dimensi kesejahteraan yang diatur UU ini meliputi: pelayanan keagamaan dan mental spiritual; pelayanan kesehatan; pelayanan kesempatan kerja; pelayanan pendidikan dan pelatihan; kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; perlindungan sosial; dan bantuan sosial.

Enam UU lainnya menginduk pada Undang-undang tersebut. Keenamnya adalah UU tentang HAM, UU tentang Bangunan dan Gedung, UU tentang Perkeretaapian, UU tentang Pelayaran, UU tentang Penanggulangan Kebencanaan, serta UU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sementara Peraturan Pemerintah (PP) terpenting menjadi landasan dari RAD adalah PP Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia yang secara keseluruhan memuat 40 indikator di mana 39 di antaranya sejalan dengan indikator kota ramah lanjut usia yang dikeluarkan WHO.

Kesadaran membukakan jalan untuk perubahan kebijakan. Demikian yang mencuat dalam proses perwujudan kota ramah lanjut usia Balikpapan. RAD memaparkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan menyadari bangunan dan ruang terbuka perlu ditata sehingga dapat dipergunakan oleh lanjut usia, perumahan dan transportasi dapat diakses oleh lanjut usia, dan lain-lain dalam cakupan delapan dimensi lanjut usia WHO agar semuanya layak bagi lanjut usia. Untuk itu, sebagai derivasinya, disadari juga kebutuhan akan perencanaan matang dari program dan berkesinambungan yang dilaksanakan oleh setiap SKPD.

Sebagai kota industri, Balikpapan memiliki potensi yang tinggi baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang sosial. Kota dengan penduduk tidak lebih dari 670 ribu jiwa tahun 2013 ini memiliki pendapatan per kapita sebesar 52 juta di tahun 2012. Indeks pembangunan manusianya tahun 2013 menduduki peringkat ke 9 secara nasional dan peringkat pertama se-Kalimantan Timur dengan nilai 79,87. Dengan angka harapan hidup masyarakat yang cukup tinggi, 72,81 tahun di tahun 2013, maka untuk mencapai apa yang diamanatkan

Undang-undang No. 13 Tahun 1998 terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Kota Balikpapan.

Dokumen RAD menyebutkan acuan utama dalam penyusunan RAD adalah hasil studi asesmen kota ramah lanjut usia yang dilakukan SurveyMETER dan CAS UI tahun 2013 (RAD halaman 4). Secara terperinci nilai indeks setiap dimensi hasil studi ini dipaparkan. Nilai total indeks komposit kota Balikpapan yang baru 46,3 (kategori warna orange) sangat disoroti untuk dapat menjadi 100 (warna hijau).

RAD memaparkan tantangan untuk mencapai kesejahteraan lanjut usia ini dalam empat kategori yaitu permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, fisik dan spiritual. Dalam tiga kategori permasalahan yang dihadapi lansia dipaparkan kondisi ke 95 indikator hasil penelitian kota ramah lansia yang dilakukan oleh SurveyMETER dan CAS UI (hal. 56-66). Terkait masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi dimasukkan kondisi dari indikator dimensi partisipasi sipil dan pekerjaan. Masalah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sosial disebutkan indikator dimensi partisipasi sosial, penghormatan dan inklusi sosial. Sementara itu permasalahan yang terkait dengan kebutuhan fisik mencakup dimensi perumahan, gedung dan ruang terbuka, transportasi, dukungan masyarakat dan pelayanan kesehatan, komunikasi dan informasi.

RAD menyebutkan bahwa kerangka konsep implementasi dari Rencana Aksi Daerah Balikpapan Menuju Kota Ramah lanjut Usia dikembangkan berdasarkan indikator-indikator kota ramah lansia yang telah ditetapkan oleh WHO (hal. 70). Demikian juga, tidak hanya menggunakan hasil riset SurveyMETER dan CAS UI tahun 2013 sebagai baseline tetapi juga mengadopsi rekomendasi dengan sedikit modifikasi tahapan implementasinya (hal. 80).

Rencana Aksi Daerah Balikpapan Menuju Kota Ramah Lanjut Usia (RAD-LS) terbagi dalam 10 dimensi kota ramah lanjut usia. Delapan dimensi di antaranya mengikuti kriteria dari WHO yang dimuat dalam hasil riset SurveyMETER dan CAS UI tahun 2013. Dua dimensi lainnya diturunkan dari indikator yang dimuat dalam PP Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia yang belum termasuk dalam dimensi kota ramah lanjut usia yaitu (1) pelayanan keagamaan dan mental spiritual; (2) pelayanan pendidikan dan pelatihan.

Detail rencana kegiatan RAD-LS juga diturunkan langsung dari indikator hasil riset. Setiap kegiatan ditentukan penanggung jawab yang menjadi leading sector. Target pencapaian RAD dibagi menjadi tiga periode yaitu periode pertama 2015-2020 menargetkan 30-45%, periode kedua 2020-2025 menargetkan 70-80%, periode ketiga 2025-2030 menargetkan 85-100%. Selain menetapkan target dalam setiap periode juga diterapkan alokasi anggaran setiap kegiatan beserta sumber dananya. Pendanaan pelaksanaan RAD akan diambil dari APBD dan APBN.

Pada periode lima tahun pertama Balikpapan merencanakan akan mengalokasikan 133 milyar; periode lima tahun kedua 298 milyar dan periode lima tahun ke tiga satu triliun rupiah (hal. 98 -119). RAD juga menetapkan rambu-rambu pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan RAD secara internal oleh semua pemangku kepentingan. Termasuk melibatkan lembaga non pemerintah seperti lembaga penelitian independen, LSM dan perguruan tinggi. Terdapat tiga jenis pemantauan akan dilakukan. Pertama, dilakukan sepanjang program berjalan, setiap tiga bulan sekali. Kedua, setahun sekali, setiap akhir tahun anggaran. Ketiga, setiap akhir periode, setiap lima tahun sekali, yaitu tahun 2020, 2025 dan

2030. Adanya RAD yang menyebabkan Balikpapan berani mendeklarasikan diri sebagai kota “Menuju Ramah Lanjut Usia.

▪ **Timeline**

Penelusuran ke belakang; mulai deklarasi (Juni 2015) hingga tahun 2007 saat WHO mengeluarkan pedoman, terdapat beberapa kejadian dan aktor penting terlibat yang mendahului (warna hijau):

- **Lahirnya Perda Kesejahteraan Lanjut Usia pada Bulan Mei 2015**

Perda tersebut merupakan turunan dari UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kelanjutan. Secara kebetulan Perda ini sudah memuat sejumlah aspek dimensi kota ramah lanjut usia menurut kriteria WHO. Di antaranya aksesibilitas pada gedung, kesehatan dan pekerjaan namun belum selengkap yang diisyaratkan pedoman WHO.

- **Pembahasan Raperda Kesejahteraan Lanjut Usia**

Sebelum disahkan pada Mei 2015, Bulan Februari hingga Maret 2015 Raperda Kesejahteraan Lanjut Usia secara intensif dibahas. Sebelumnya, pada Desember 2013 Raperda ini mulai dibahas paska diseminasi hasil Studi KRL dilakukan. Mendahului pengesahan Perda ini, pada Juli 2014 juga disahkan Perda Pelayanan yang salah satu pasalnya (pasal 36) memuat pelayanan akses khusus termasuk pada lansia.

Kesadaran dan penguasaan terhadap konsep ramah lanjut usia dari pemangku kepentingan di Balikpapan meningkat setelah digelarnya diseminasi hasil riset. Terbukti DPRD berinisiatif mengusulkan peningkatan dana untuk panti, peresmian panti intergenerasi, dan adanya hotel yang ramah lansia dan disabilitas. Hotel ini menyediakan kamar khusus untuk lansia dan penyandang diabilitas.

- **Lahirnya RAD pada September 2014**

Walikota Balikpapan dengan bangga menginformasikan Kota Balikpapan telah memiliki RAD Menuju Kota Ramah Lanjut Usia (RAD LS) yang mengacu pada hasil survei yang dilakukan tim peneliti SurveyMETER dan CAS UI tahun 2013. Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Kota Balikpapan juga mendukung keberadaannya. Menurut Ketua DPRD, “disahkannya Perda Kesejahteraan Lanjut Usia juga salah satu upaya utama melancarkan program ini”.

- **Pengumuman Lelang Penyusunan RAD, Juni 2014**

Enam bulan setelah diseminasi, pada Bulan Januari tahun 2014, di hadapan publik Walikota kembali menyatakan komitmennya untuk mewujudkan Kota Balikpapan menjadi kota ramah lanjut usia. Pak Walikota mengatakan “Tahun ini selain menjadikan Balikpapan sebagai kota layak anak, kita juga memberikan perhatian kepada mereka yang lansia. Ini komitmen kita juga”. Selanjutnya, pada Bulan Juni 2014 Walikota menepati janjinya. Pemkot mengumumkan lelang pembuatan RAD Kota Balikpapan. Selama tiga bulan bekerja, konsultan pemenang tender melahirkan RAD Balikpapan Menuju Kota Ramah Lanjut Usia 2015-2030.

- **Walikota menyatakan akan menyusun RAD, Januari 2014**

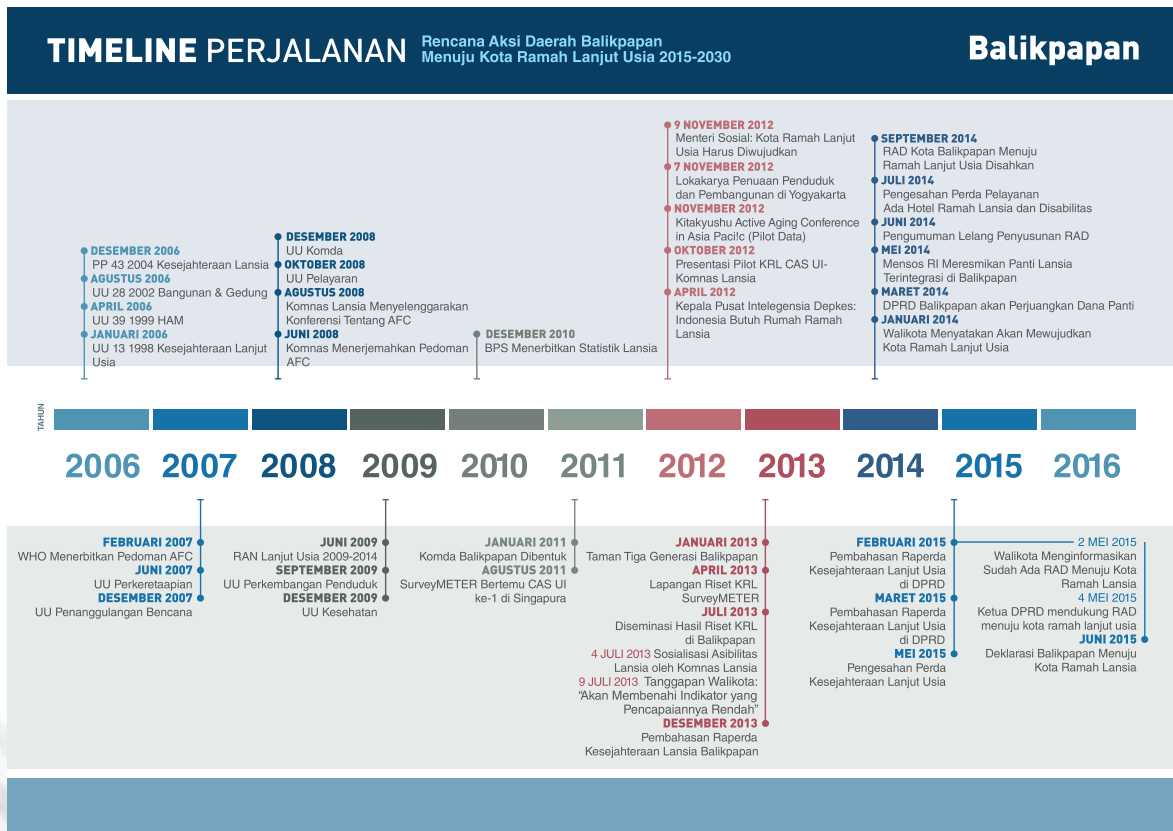
Perencanaan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait isu kelanjutan kemudian tersusun dalam RAD yang disahkan oleh walikota.

- **Pembahasan Raperda Kesejahteraan Lansia Dimulai, Desember 2013**

Paska diseminasi, Walikota berpesan kepada seluruh SKPD Pemerintahan Kota (Pemkot) Balikpapan agar segera menyusun perencanaan dan tindak lanjut dalam mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota ramah lanjut usia. Termasuk mengusulkan dibuatnya sebuah Perda khusus.

- **Bulan Juli 2013 Diseminasi Hasil Penelitian Asesmen Kota Ramah Lanjut Usia.**

Kota Balikpapan selangkah lebih maju dibanding banyak kota lain. Komitmen pucuk Pemkot Balikpapan, Walikota Rizal Effendi, adalah titik balik lahirnya RAD Balikpapan Menuju Kota Ramah Lanjut Usia. Hal tersebut sudah nampak sejak beliau mengikuti langsung diseminasi hasil riset SurveyMETER dan CAS UI tahun 2013 pada Juli 2013. Riset ini memuat kesesuaian Kota Balikpapan sebagai kota ramah lanjut usia menurut masyarakatnya.



Gambar 1. Timeline Perjalanannya Rencana Aksi Daerah Balikpapan Menuju Kota Ramah Lanjut Usia 2015-2030

Menanggapi hasil riset tersebut Pak Walikota menyampaikan akan segera membenahi indikator yang pencapaiannya rendah. Beliau juga memaparkan impiannya tentang kota ramah lanjut usia Balikpapan. Dalam hal perumahan Pak Walikota berharap agar pengelola rumah susun mengutamakan lansia yang menempati lantai bawah. Impiannya yang lain: "Saya bercita-cita Balikpapan akan memiliki taman yang nyaman bagi para lansia, di mana mereka dapat duduk sembari menikmati udara segar, olah raga, membaca buku hingga memancing".

Mundur jauh ke belakang, kebijakan pemerintah Indonesia terkait kelanjutusiaan dimulai dari tahun 1998. Pada tahun tersebut pemerintah dengan pengawalan DPR RI membuat kebijakan awal dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tentang Kesejahteraan Lanjut usia. Undang-undang ini merupakan landasan dasar dari berbagai Rencana Aksi Daerah menuju Kota Ramah Lanjut Usia di Indonesia. Namun dimensi keramahlanjutan yang diatur di dalamnya tidak selengkap pedoman kota ramah lanjut usia yang dikeluarkan WHO tahun 2007. Sebelum dan hingga tahun 2007 sejumlah UU dan peraturan juga lahir untuk mendukung terwujudnya komunitas ramah lanjut usia di Indonesia. Di antaranya UU tentang HAM, UU tentang Bangunan dan Gedung, dan seterusnya.

Komnas Lansia memegang peran sentral pada awal inisiatif keramahlanjutan ini diperkenalkan WHO. Tahun 2008, Komnas Lansia merespon dengan menerjemahkan Guideline WHO serta menyelenggarakan seminar tentang kota ramah lanjut usia. Seminar dihadiri sejumlah pakar dari negara ASEAN. Tahun 2009 Komnas Lansia bersama pemangku kepentingan dalam bidang kelanjutusiaan menjadikan aksi “Meningkatkan upaya penyediaan sarana dan fasilitas khusus bagi lanjut usia” sebagai salah satu agenda dalam Rencana Aksi Nasional Lanjut Usia 2009-2014. Sejumlah sosialisasi juga dilakukan Komnas Lansia terkait asesibilitas lanjut usia di daerah-daerah.

Di Kota Balikpapan sosialisasi dilakukan pada Juli 2013 bersamaan dengan presentasi hasil penelitian asesmen kota ramah lansia SurveyMETER dan CAS UI. Sebelumnya, pilot studi asesmen kota ramah lanjut usia dilakukan CAS UI bersama-sama dengan Komnas Lansia tahun 2011 di mana SurveyMETER mensupport analisis data kuantitatifnya. Hasil pilot studi ini dipresentasikan dalam sejumlah konferensi internasional dan seminar nasional tahun 2012.

Dalam periode 2008-2012 Pemerintah Indonesia didukung oleh DPR RI kembali menunjukkan suportnya dengan mengesahkan UU Pelayaran yang memuat pasal-pasal terkait dengan dimensi ramah lanjut usia yang diisyaratkan oleh WHO. Kemudian, melalui Kemendagri pemerintah menerbitkan Permendagri No. 60 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komda Lansia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah. Selanjutnya, terkait pelayanan penduduk dan kesehatan lanjut usia pemerintah memberlakukan PP No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pada periode tersebut, walau tidak intensif, Pemerintah Pusat melalui sejumlah kementerian dan lembaga memberikan himbauan-himbauan untuk mewujudkan kota ramah lanjut usia. Beberapa di antaranya, tahun 2012 Kepala Pusat Intelegensia Kemkes mengatakan “Indonesia Butuh rumah ramah lansia agar lansia bisa produktif di usia senja”. Di tahun yang sama, pada Rakor Komnas Lansia, Menteri Sosial juga memberikan himbauan “Kota ramah lanjut usia harus diwujudkan, mungkin dari kota-kota kecil”. Dari sisi data, Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan publikasi Statistik Lanjut Usia 2010 berdasar hasil Sensus Penduduk tahun 2010.

Di Kota Balikpapan, sebelum 2013, SKPD kota terkait hanya melaksanakan program pemerintah pusat mengenai kesejahteraan lanjut usia. Seperti program *home care*, bantuan pada lansia terlantar, posyandu lansia, bina keluarga lansia, dan puskesmas ramah lanjut usia. Belum banyak aktivitas lain yang terkait langsung dengan indikator dimensi kota ramah

lanjut usia WHO. Salah satu inisiatif yang relevan dalam periode ini adalah pembangunan taman tiga generasi.

Meski sudah hadir sejumlah payung hukum yang memuat beberapa pedoman WHO tentang kota ramah lanjut usia, namun para lanjut usia dan pra lanjut usia Indonesia termasuk kota-kotanya belum mampu memenuhi kriteria WHO tersebut. Hasil penelitian SurveyMETER dan CAS UI tahun 2013, pada tingkat nasional skor kompositnya hanya 42,9. Sedangkan Kota Balikpapan memperoleh skor 46,3 dari maksimal 100.

Peran Riset dalam Kebijakan

Kepada media, secara eksplisit Walikota Balikpapan mengatakan: “RAD ini mengacu pada hasil survei yang dilakukan SurveyMETER and Center for Ageing Studies UI, pada tahun 2013”. Survei yang diacu Walikota ini adalah Riset Asesmen Kota Ramah Lanjut Usia di 14 kota tahun 2013.

Mencermati dokumen RAD, puncak landasan RAD adalah nilai skor total kesesuaian Balikpapan dilihat dengan indikator kota ramah lansia WHO. Hasil penelitian SurveyMETER menunjukkan Balikpapan baru mencapai skor 46,3 (dalam katagori orange). Tergolong belum baik karena skor maksimum adalah 100 (katagori hijau skor 75-100).

Tidak hanya skor nilai total yang dimasukkan dalam RAD tetapi juga skor setiap dimensi dan skor ke 95 indikator turunannya berikut katagori warnanya. Pola perencanaan dan goal pencapaiannya juga mengikuti rekomendasi riset. Secara total ada lebih dari 13 halaman dari RAD “dicopy” dari hasil riset.

Riset Asesmen Kota Ramah Lanjut Usia berawal dari kajian perubahan struktur umur penduduk Indonesia. Jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat, jika penduduk lansia pada tahun 2010 hanya berjumlah 18 juta, tahun 2025 akan mencapai 34 juta dan tahun 2030 berlipat, mencapai 41 juta. Kalau dipersentasekan, lima belas tahun mendatang, populasi lanjut usia diperkirakan akan mencapai 13, 9% atau dua kali lipat dari jumlah penduduk umur 0-4 tahun. Selain itu, masalah urbanisasi dan persentase penduduk kota di Indonesia juga meningkat pesat.

Menghadapi fenomena demografi tersebut, sejumlah lembaga mitra pembangunan internasional termasuk PBB dan WHO mengeluarkan rekomendasi dan menciptakan berbagai *tools* untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Pada tahun 2007 WHO mengeluarkan pedoman kota ramah lanjut usia (age friendly cities guideline). Check list panduan asesmen untuk kota ramah lanjut usia dari WHO ini mencakup 8 dimensi yaitu: gedung dan ruang terbuka, transportasi, perumahan, partisipasi sosial, penghormatan dan inklusi sosial, partisipasi sipil dan pekerjaan, komunikasi dan informasi, dukungan masyarakat dan kesehatan.

Indonesia masih jauh dari kondisi lingkungan yang bisa dikategorikan sebagai ramah lanjut usia. Kondisi inilah yang mendorong dilakukan studi asesmen KRL. Studi ini merupakan buah kerjasama SurveyMETER dan CAS UI dengan suport KSI. Pengumpulan data studi di 14 kota sampel dilakukan pada bulan Januari hingga Maret 2013. Seluruh kota sampel tersebut adalah Medan, Payakumbuh, Mataram, Denpasar, Jakarta Pusat, Depok, Yogyakarta, Solo,

Surabaya, Malang, Makassar, Balikpapan, Semarang, dan Bandung. Empat belas kota tersebut merepresentasikan kategori kota besar, menengah, kota kecil, dan kota industri di Indonesia. Kota Balikpapan terpilih sebagai wilayah studi mewakili kota industri. Dalam studi ini, wawancara dilakukan kepada 2.100 orang laki-laki dan perempuan, kelompok umur pra-lanjut usia dan lanjut usia yang tersebar di 14 kota tersebut.

Selain bertujuan mendokumentasikan pendapat masyarakat lanjut usia maupun pra lanjut usia mengenai kesesuaian kota lokasi studi atas indikator-indikator kota ramah lansia WHO, studi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi rekomendasi kepada pemerintah kota dalam membuat kebijakan menciptakan Kota Ramah Lanjut Usia di tahun 2030.

Hasil studi KRL ini memperlihatkan tingkat kesesuaian Kota Balikpapan dalam memenuhi kriteria kota ramah lanjut usia WHO mencapai skor 46,3 (dari skor maksimum 100). Lebih tinggi sedikit dari keadaan umumnya di 14 kota Indonesia yang mencapai 42,9. Dengan hasil ini, berarti masih cukup banyak yang perlu dibenahi di kota ini. Dimensi kota ramah lanjut usia yang terdepan di Kota Balikpapan adalah Komunikasi dan Informasi skor 61, Dukungan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan skor 57, Gedung dan Ruang Terbuka skor 55 dan Transportasi skor 55. Keempat dimensi ini juga lebih unggul dibandingkan dengan keadaan rata-rata di 14 kota Indonesia. Sementara dimensi yang masih kurang di Balikpapan dan juga di Indonesia pada umumnya adalah Partisipasi Sipil dan Pekerjaan (skor 15) serta dan Perumahan (skor 33). Patut lebih diperhatikan, di kota ini ada dua dimensi yang memiliki skor lebih rendah dari rata-rata 14 kota Indonesia yaitu Partisipasi Sosial (skor 45) serta Penghormatan dan Inklusi Sosial skor 48.

Studi KRL juga membuat kategori pencapaian dengan warna: hijau, kuning, orange dan merah. Warna hijau jika nilainya sudah mencapai 75 ke atas, kuning bernilai 50-74, orange 25-49, dan merah jika nilainya di bawah 25. Hasil riset di Balikpapan menunjukkan dari 95 indikator yang mencapai warna hijau baru mencapai 18%, kuning 38%, orange sekitar 18%, dan merah sekitar 25%. Hasil-hasil riset ini yang disampaikan oleh tim peneliti SurveyMETER pada Bapak Walikota dan berbagai pemangku kepentingan yang hadir pada saat diseminasi hasil riset pada 2 Juli 2013. Hasil ini juga ditampilkan dalam publikasi keseluruhan hasil riset di penghujung tahun 2013.

Mencermati cerita perubahan kebijakan yang terjadi dan timeline peristiwa penting yang menggambarkan aktor dan keputusan penting yang membawa perubahan dalam kebijakan tampak riset asesmen kota ramah lanjut usia SurveyMETER dan CAS UI tahun 2013 berpengaruh dalam kebijakan lewat tiga jalur. Pertama, memperluas kapasitas kebijakan dengan meningkatkan pengetahuan aktor. Riset KRL 2013 memperbaiki dan memperbaharui informasi pimpinan Pemerintah Kota Balikpapan dan pemangku kepentingan lainnya. Bapak Walikota Balikpapan mendengarkan langsung pemaparan hasil riset sebelum dilaksanakan diseminasi hasil riset pada para pemangku kepentingan. Pada saat diseminasi ini hadir juga Ketua Komda Lansia, Ketua Tim Penggerak PKK dan SKPD terkait seperti Disnakersos, Dinas Kesehatan, dll. Masyarakat Kota Balikpapan juga terpapar dengan hasil studi lewat berita di media tentang diseminasi hasil studi tersebut.

Kedua, memperluas horizon pengambil kebijakan. Riset telah memperkenalkan konsep baru untuk sebuah agenda kegiatan. Riset mengenalkan konsep kota ramah lansia WHO yang

terdiri dari 8 dimensi dan terbagi menjadi 95 indikator kunci agar lansia tetap sehat, bahagia, aktif, mandiri dan berpartisipasi seperti keinginannya di usia senja.

Ketiga, mempengaruhi rezim kebijakan yang menyebabkan adanya perubahan kebijakan. Hasil riset merekomendasikan pemerintah kota untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dengan mengerjakan indikator-indikator yang nilainya rendah dan melibatkan banyak aktor. Hasil riset juga memotivasi mencapai impian ramah lanjut usia di tahun 2030 dalam beberapa tahapan dengan dijadikan sebagai dasar penyusunan RAD. Rekomendasi riset juga dijadikan acuan dalam pencapaian *goal* RAD. Buah dari riset mempengaruhi rezim kebijakan ini adalah adanya Rencana Aksi Daerah Kota Balikpapan Menuju Ramah Lanjut Usia 2015-2030 pada Bulan September 2014. Rencana tersebut bermuara pada Deklarasi Kota Balikpapan Menuju Kota Ramah Lanjut Usia pada Bulan Juni 2015. Pengaruh lainnya, mempercepat pengesahan Perda Kesejahteraan Lanjut Usia. Perda ini diinisiasi oleh DPRD periode 2004-2009. Namun pembahasan Rancangan Perda baru mulai dilakukan lagi secara intensif sejak Desember 2014 dan disahkan pada Bulan Mei 2015. Perda ini juga memuat sejumlah indikator kota ramah lanjut usia seperti dalam kesehatan, pekerjaan dan fasilitas umum.

▪ Bagaimana Riset Dikomunikasikan

Kenapa hal ini bisa terjadi di Kota Balikpapan? Menelisik mundur satu tahun ke belakang sebelum RAD lahir, pada Bulan Juli 2013 SurveyMETER melakukan diseminasi hasil penelitian. Sebelum diseminasi, tim peneliti berkesempatan mem-*brief* singkat Bapak Walikota mengenai hasil penelitian ini. Selanjutnya pada saat membuka acara diseminasi Bapak Walikota memberikan arahan kepada SKPD dan pemangku kepentingan lainnya. Arahannya adalah agar segenap SKPD mendukung terwujudnya Balikpapan menuju kota ramah lanjut usia misalnya dalam bidang perumahan, pekerjaan dan ruang terbuka hijau. Selain melalui acara diseminasi dan briefing untuk Walikota, SurveyMETER juga mempublikasikan hasil penelitian ini dalam sebuah buku kecil dan disampaikan kepada Pemkot Balikpapan.

▪ Kesimpulan dan Pembelajaran

Dari pengamatan, paling tidak ada enam faktor penting yang menyebabkannya riset dapat mempengaruhi kebijakan. Faktor ini berasal dari kedua belah pihak yaitu pengambil kebijakan dan juga dari sisi peneliti. Keenam faktor tersebut adalah, Pertama, Keterbukaan pimpinan daerah kota pada bukti dari hasil riset. Kedua, Keterencanaan pemerintah daerah untuk mencapai goal yang ingin dicapai. Ketiga, Hasil penelitian disampaikan secara sederhana dalam indek komposit dan kategori warna pencapaian. Keempat, Rekomendasi yang diberikan disampaikan secara detail sehingga bisa diadopsi langsung dalam kebijakan. Kelima, Adanya kepercayaan pengambil kebijakan pada peneliti yang lahir dari empat faktor sebelumnya. Keenam, Lingkungan kebijakan yang kondusif dan ada perda yang menaungi deklarasi berdasarkan RAD

Daftar Pustaka

- Carden, Fred, 2009. Knowledge to Policy-making the Most of Development Research. Sage Publications, India.
- Dinakersos Kota Balikpapan, 2014. Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Balikpapan Menuju Kota Ramah Lanjut Usia Tahun 2015-2030. Dinakersos Kota Balikpapan
- International Development Research Center, 2011. A Strategic Evaluation of the Influence of Research on Public Policy: The Methodology. International Development Research Center
- Pemerintah Kota Balikpapan, 2015. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia
- SurveyMETER dan CAS UI, 2013. Satu Langkah Menuju Impian Lanjut Usia Kota Ramah Lanjut Usia 2030 – Indonesia. Insist, Yogyakarta
- World Health Organization, 2007. Global Age-Friendly Cities: A guide. WHO Press.





SurveyMETER

Jl. Jenengan Raya No. 109 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282
Phone. 0274 - 4477464 | Fax. 0274 - 4477004
email: sm@surveymeter.org | website: www.surveymeter.org